



RENCANA KERJA

POLDA LAMPUNG

2022

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR : KEP/ 423 /VI/2021, TANGGAL 28 JUNI 2021



RENCANA KERJA

POLDA LAMPUNG

2022

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR : KEP/ 423 /VI/2021, TANGGAL 28 JUNI 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
UNIT KERJA POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Dokumen Rencana Kerja Polda Lampung tahun 2022, sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (4), Pasal 9 ayat (3) huruf b dan pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai substansi informasi yang dimuat dalam dokumen tersebut menjadi tanggungjawab manajemen Polri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas penyusunan Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2022 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandar Lampung, Juli 2021

IRWASDA POLDA LAMPUNG



Drs. EDDY HERMANTO, M.M., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68110215



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Nomor: Kep/ 423 /VI/2021

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
 6. Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024;
 7. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/4/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2022.
 8. Keputusan Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/464/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Polda Lampung Tahun 2020-2024.

Memperhatikan

- Memperhatikan:
1. Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Polda/Satker T.A 2022;
 2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/571/V/REN.2.3/2021/Srena tanggal 10 Mei 2021 perihal Pagu Indikatif Polda/Satker T.A. 2022;
 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

1. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Polda Lampung;
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
pada tanggal: 28 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Polda Lampung.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Latar Belakang	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	6
b. Analisa SWOT	15
2. Identifikasi Masalah	19
II. Tujuan Dan Sasaran	21
1. Visi dan Misi	21
a. Polri	21
b. Polda Lampung.....	21
2. Tujuan Jangka Menengah	21
a. Polri.....	21
b. Polda Lampung.....	22
3. Sasaran Prioritas	22
a. Polri.....	22
b. Polda Lampung.....	23
III. Arah Kebijakan dan Strategi T.A. 2022.....	25
1. Polri	25
2. Polda Lampung.....	28
IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2022.....	45
1. Program dan Kegiatan	45
2. Pagu Indikatif Polda Lampung T.A 2022.....	47
3. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif T.A 2022.....	52
V. PENUTUP	54

DAFTAR LAMPIRAN:

- I. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- II. Formulir Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Polda Lampung Tahun Anggaran 2022



RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG T.A. 2022

I. Latar Belakang.

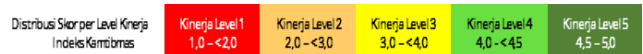
1. Kondisi Umum.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari tahapan Rencana Strategis Polda Lampung Tahun 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2021, sehingga Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polda Lampung 2020-2024. Pelaksanaan tugas Polda Lampung telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan, ditandai dengan melihat fakta sebaran kinerja **indeks kamtibmas**¹ Polda Lampung tahun 2020, dibawah ini.



Dari gambar peta tersebut diperoleh informasi bahwa sebaran kinerja Polda Lampung dan jajaran, berada pada kinerja level 3 (*skala likert 1-5*) yaitu berada pada kisaran nilai indeks $3,0 \geq 4,0$. Pengukuran Indeks kamtibmas ini berdasarkan dua dimensi yaitu dimensi **indeks pemeliharaan kamtibmas**², yang didalamnya terdapat delapan variabel, masing-masing; *road savety indeks*, *Index comunity policing*, kegiatan patroli, kegiatan harkamtibmas perairan, tingkat kualitas penanggulangan keamanan

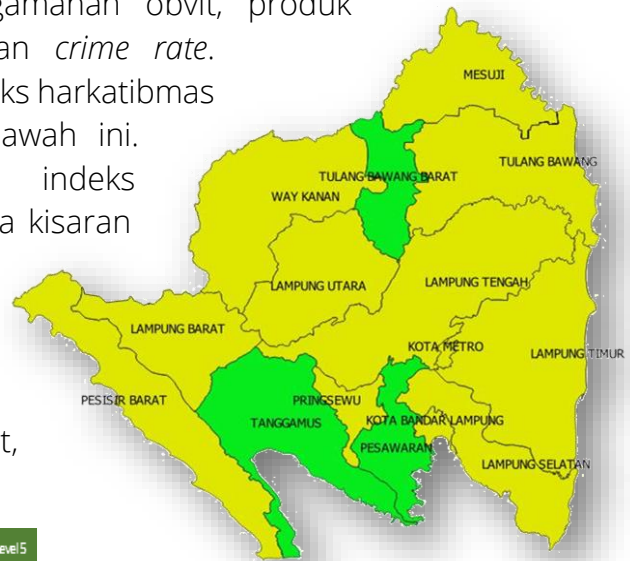
Gambar 1. Sebaran kinerja indeks kamtibmas.T.A. 2020



¹ **Indeks kamtibmas** merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang tersusun atas indeks harkamtibmas dan indeks penegakan hukum (berdasarkan Kep Kapolri: Kep/1910/IX/20120 tanggal 24 September 2020).

² **Indeks harkamtibmas** merupakan indikator yang mengukur kinerja Polri dalam melakukan upaya pemeliharaan kamtibmas serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan yang tersusun atas delapan komponen masing-masing road savety indeks, Indeks comunity policing, kegiatan patroli, kegiatan harkamtibmas perairan, tingkat kualitas penanggulangan keamanan berkadarnya tinggi, pelayanan pengamanan obvit, produk intelijen yang ditindaklanjuti dan crime rate.

berkadar tinggi, pelayanan pengamanan obvit, produk intelijen yang ditindaklanjuti dan *crime rate*. Adapun peta sebaran kinerja indeks harkatibmas dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Pada kinerja tahun 2020 indeks harkamtibmas sama berada pada kisaran indeks $3,0 \geq 4,0$. Terdapat tiga wilayah Polres yang kinerja indeks harkamtibmas berwarna hijau muda yaitu Polres Tulang bawang Barat, Pesawaran dan Tanggamus.



Distribusi Skor per Level Kinerja Indeks harkamtibmas	Kinerja Level 1 20 ≤ 40	Kinerja Level 2 40 ≤ 60	Kinerja Level 3 60 ≤ 80	Kinerja Level 4 80 ≤ 90	Kinerja Level 5 90 ≤ 100
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Gambar 2. Sebaran kinerja indeks harkamtibmas T.A. 2020

Selanjutnya tinjauan indeks kamtibmas yang lain adalah dimensi **indeks penegakan hukum**³, yang tersusun atas enam variabel pembentuknya yaitu persentase penyelesaian tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara kontijensi, perkara laka lantas, tindak pidana perairan. Hasil sebaran kinerja indeks penegakan hukum tahun 2020 tersebut sebagai gambar dibawah ini, secara umum berada pada level 2-4,5. Kinerja indeks penegakan hukum yang berada pada level $2 \leq 3$ adalah Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Tengah, Polres Metro dan Polres Tulang Bawang Barat. Semetara itu kinerja level $3 \leq 4$ diperoleh Polres Tanggamus, Polres Pesawaran, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Barat dan Polres Tulang Bawang. Kemudian yang kinerja level $4 \leq 4,5$ diperoleh Polres Way Kanan, Lampung Utara dan Polres Mesuji.



Distribusi Skor per Level Kinerja Indeks penegakan hukum	Kinerja Level 1 20 ≤ 40	Kinerja Level 2 40 ≤ 60	Kinerja Level 3 60 ≤ 80	Kinerja Level 4 80 ≤ 90	Kinerja Level 5 90 ≤ 100
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

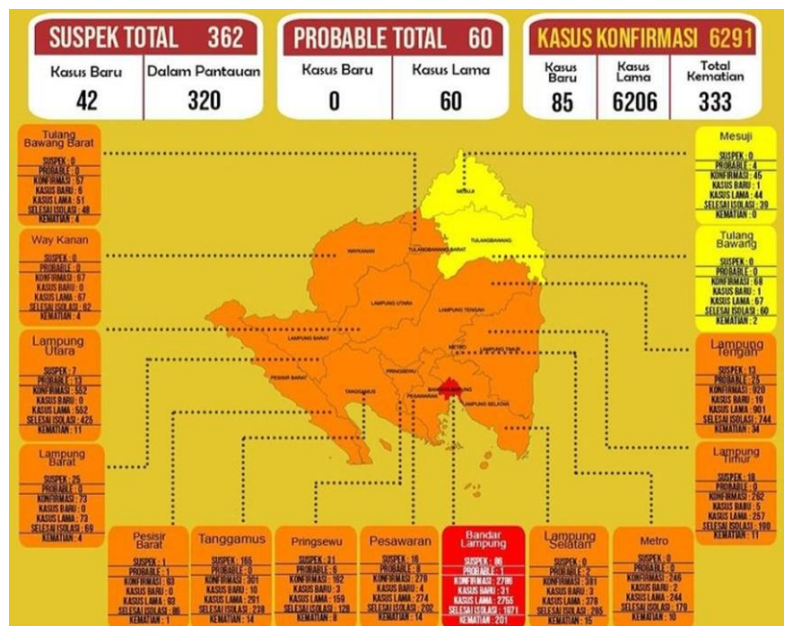
Gambar 3. Sebaran kinerja indeks penegakan hukum T.A.

Secara makro kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat telah terlihat dari Indeks kamtibmas, Indeks harkamtibmas dan indeks penegakan hukum serta meningkatnya pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara maupun kejahatan yang berimplikasi

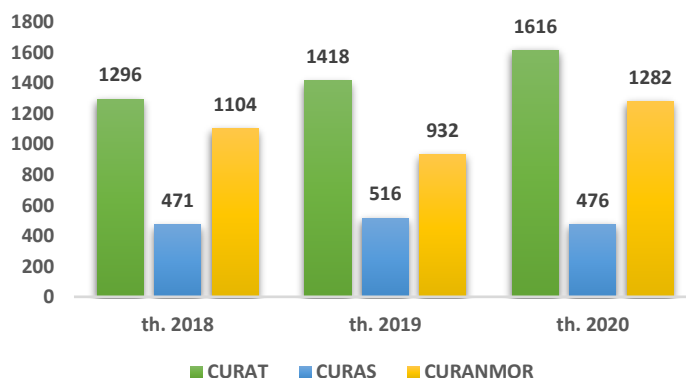
³ **Indeks penegakan hukum** merupakan indikator untuk mengukur kinerja Polri dalam menyelesaikan suatu tindak kejahatan, dengan enam variabel pembentuknya yaitu persentase penyelesaian tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara kontijensi, perkara laka lantas, tindak pidana perairan

kontijensi dinilai cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap indeks penegakan hukum. Keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Lampung yang didukung oleh *stakeholders* terkait dengan tugas Kepolisian. Sejauh ini apresiasi dan kritik masyarakat pemerhati kepolisian, dijadikan sebagai tantangan bagi Polda Lampung dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa yang akan datang di tengah keadaan anomali penanganan pandemi covid-19 yang melanda dunia. Pada tahun 2020 perkembangan Covid-19 di daerah hukum Polda Lampung tergambar pada ilustrasi berikut ini.

Terlihat semua wilayah kabupaten kota masuk dalam kategori zona oranye, kecuali Mesuji dan Tulang Bawang masih berwarna kuning dan Kota Bandar Lampung berwarna merah. Keadaan ini akan terus berlanjut pada tahun berikutnya termasuk pada tahun 2022. Sehingga perlu menjadi perhatian bersama stakeholder untuk bersama-sama menurunkan penyebaran penularan virus Covid-19.



Gambar 4. perkembangan sebaran Covid-19 (31 desember 2020)



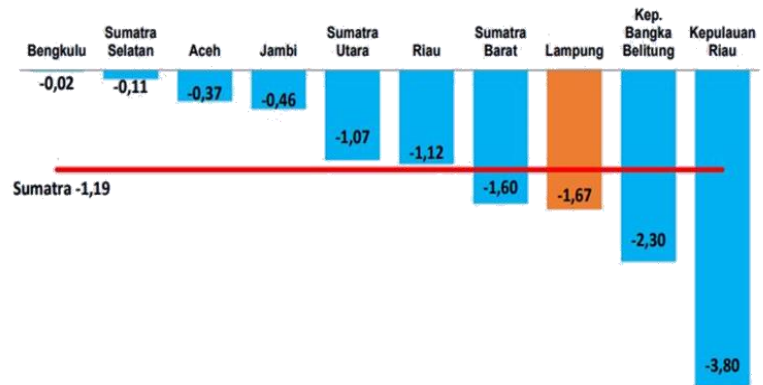
Gambar 3. Dinamika kasus menonjol tiga tahun terakhir.

curat dan curamnor mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

pada peristiwa tindak pidana curas, curat dan curanmor. Dalam tiga tahun terakhir kasus tersebut menjadi perhatian Polda Lampung dan jajaran yang berupaya untuk menekan terjadinya tindak pidana tersebut dan berupaya meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus tersebut, terlihat bahwa dalam tahun 2020 tindak pidana curat dan curamnor mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian apabila dikaitkan dengan kondisi ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan indikator laju pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto Prov. Lampung tahun 2020⁴ dibandingkan dengan provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Laju pertumbuhan PDRB se-Sumatera tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,19 persen dibanding tahun 2019. Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,80



Gambar 4. Laju pertumbuhan PDRB se-Sumatera tahun 2020 (%).

persen dan kontraksi pertumbuhan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,02 persen. Provinsi Lampung menempati posisi kedelapan dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 1,67 persen, hal ini dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR (lembaga non-profit yang melayani rumah tangga), pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor barang dan jasa, dikurangi impor barang dan jasa.

Disamping memperhatikan fakta di atas, maka Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2022 juga memperhatikan dinamika kebijakan yang terjadi di institusi Polri, yaitu kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prwabowo, M.Si. "Transformasi menuju Polri yang Presisi" dengan empat kebijakan utama yaitu: **1) transformasi organisasi (*transforming organization*)** dengan program penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di *era Police 4,0*, perubahan teknologi Kepolisian Modern di *era Police 4.0*; **2) transformasi operasional (*transforming operation*)** dengan program pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas, peningkatan kinerja penegakan hukum, pementapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, menjamin keamanan program prioritas nasional, penguatan penanganan konflik sosial; **3) transformasi pelayanan publik (*transforming public service*)** dengan program peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pementapan komunikasi publik ; **4) Transformasi pengawasan (*transforming supervision*)** dengan program pengawasan

⁴ Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Prov. Lampung edisi No. 16/02/18/Tahun XXIII, 5 Februari 2021.

pimpinan terhadap setiap kegiatan, penguatan fungsi pengawasan, pengawas oleh masyarakat (*public complaint*) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi 2015 – 2024, sesuai misi ke 5 pembangunan bidang keamanan diarahkan sesuai dengan tema, yaitu “Menegakan supremasi hukum, membangun peradapan demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Misi ini adalah upaya untuk mendukung pematapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan hukum serta memberantas KKN juga berupaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan.

Polda Lampung dalam kebijakannya senantiasa mengarahkan pada terbangunnya kepercayaan publik yang bersifat terus menerus dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan pada *internal* maupun *eksternal* kepolisian dalam rangka mewujudkan *good governance* dan upaya mencapai *service quality*. Sehingga Polda Lampung diharapkan dapat semakin akuntabel dan meningkatkan upaya antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah yang senantiasa terus menerus menginginkan Polda Lampung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat.

Tantangan dan harapan masyarakat adalah untuk mewujudkan **transformasi Polri Presisi yang merupakan abreviasi dari PREDiktif, responSibilitas dan transparanSI berkeadilan yang merupakan fase lanjut dari Polri Promoter (PROfesional, MOdern dan TERpercaya);** yang lebih menekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menekan tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata **responsibilitas dan transparansi berkeadilan** menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan kepada Polri agar mampu melaksanakan tugas (1) secara cepat dan tepat; (2) responsif; (3) humanis; (4) transparan; (5) bertanggungjawab; dan (6) berkeadilan.

Dalam hal perkembangan lingkungan strategis, faktor-faktor yang berkaitan dengan ipoleksosbud dan keamanan perlu menjadi perhatian dan masukan yang harus diperhitungkan, karena semakin dinamis dan

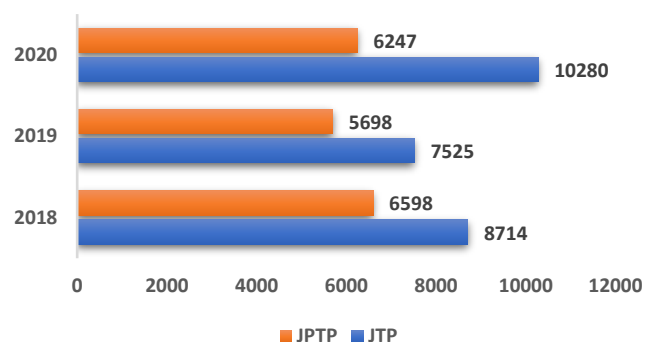
kompleksnya hubungan antar daerah/wilayah yang tanpa batas, warga masyarakat semakin mudah terhubung akibat perkembangan teknologi dan informasi dan transportasi semakin cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif bergeser menjadi perilaku negatif seperti; eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme. Terjadinya isu-isu pada lingkungan strategis seperti; demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia serta penyebaran *Covid-19* yang bermutasi dari suatu daerah ke daerah lain. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban, sehingga Renja Polda Lampung T.A. 2022 harus mengakomodir terhadap kepentingan tupoksi Polda Lampung dalam mengelola kondusivitas kamtibmas di prov. Lampung. Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Lampung yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut dianalisis dengan SWOT sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan.

Isu nasional secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal kedaerahan di Provinsi Lampung. Isu lokal ini meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Lampung, sehingga perlu pemahaman secara tepat dan akurat terhadap isu yang berkembang melalui perencanaan antisipasi dan solusi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Prov. Lampung. Karena apabila tidak dikelola dengan baik maka kondisi yang ada di daerah akan berpengaruh terhadap lingkungan nasional dan global, oleh karena itu Polda Lampung dan jajaran dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan yang timbul dan bersumber dari aspek Astagatra:

1) Geografi.

Letak geografi Provinsi Lampung yang dibatasi oleh sebagian besar wilayah lautan (Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera Hindia) dan menjadi gerbang keluar/masuk Pulau Sumatera ke Jawa melalui pelabuhan penyeberangan laut



Gambar 5. Perkembangan tindak pidana dan penyelesaiannya.

(Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya) yang merupakan potensi strategis sekaligus merupakan peluang terjadinya berbagai bentuk kerawanan kamtibmas. Sebagaimana telah terjadi dan diungkap pada tahun 2020 dan periode tahun-tahun sebelumnya.

2) Demografi.

Jumlah penduduk Daerah Lampung hasil sensus penduduk tahun 2020 BPS telah merilis hasil sensus penduduk. Provinsi Lampung saat ini adalah sebanyak 9.007.848 jiwa berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini cukup berimbang antara laki-laki dengan perempuan, yang tersebar pada 15 kabupaten/kota. Dengan luas wilayah Provinsi Lampung sebesar 34,62 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Lampung Barat	156 942	145 197	302 139
Tanggamus	331 491	308 784	640 275
Lampung Selatan	544 745	519 556	1 064 301
Lampung Timur	565 743	544 597	1 110 340
Lampung Tengah	747 237	712 808	1 460 045
Lampung Utara	322 935	310 164	633 099
Way Kanan	242 874	230 701	473 575
Tulang Bawang	222 394	207 627	430 021
Pesawaran	246 002	231 466	477 468
Pringsewu	208 763	196 703	405 466
Mesuji	117 509	110 009	227 518
Tulang Bawang Barat	146 355	139 807	286 162
Pesisir Barat	84 717	77 980	162 697
Bandar Lampung	594 292	571 774	1 166 066
Metro	84 806	83 870	168 676
Lampung	4.616.805	4.391.043	9.007.848

Gambar 5. Jumlah penduduk Lampung hasil Sensus 2020

sebanyak 260 jiwa per km². Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Provinsi Lampung sebanyak 192 jiwa per km² dan hasil SP2010 yang mencapai 220 jiwa per km². Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 yaitu Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebanyak 1,46 juta jiwa atau sekitar 16,21% dibandingkan dengan penduduk Provinsi Lampung. Hal ini dapat dipastikan mengundang kerawanan terhadap gangguan kamtibmas.

3) Sumber daya alam.

Di wilayah Provinsi Lampung berdasarkan hasil penelitian ditengarai kemungkinan memiliki potensi bermacam-macam sumber daya alam yang belum dieksplorasi, di antara adalah minyak bumi, uranium, batuan muda (*brown coal*), mineral besi, emas, pasir kwarsa dan perak serta sumber air panas dan gas bumi. Sedangkan sumber daya alam lainnya yaitu hasil hutan sampai dengan tahun 2020 telah banyak mengalami kerusakan dan berubah fungsi menjadi areal pertanian, perkebunan dan

pemukiman, bahkan dijumpai kasus-kasus yang bersumber dari masalah hutan, seperti sengketa lahan, perambahan hutan, pembalakan liar dll. Adapun berdasarkan data BPS terhadap komoditas dominan di provinsi Lampung adalah sektor perkebunan.

Kabupaten/Kota	Jumlah	Komoditas yang diusahakan
Tanggamus	2	Karet, Kakao
Lampung Selatan	3	Kelapa Sawit, Karet
Lampung Tengah	7	Kelapa Sawit, Tebu
Lampung Utara	8	Kelapa Sawit, Tebu
Way Kanan	12	Kelapa Sawit, Karet, Tebu
Tulang Bawang	7	Kelapa Sawit, Tebu
Pesawaran	2	Karet
Mesuji	5	Kelapa Sawit, Karet
Tulang Bawang	1	Karet
Bandar Lampung	3	Kelapa Sawit
LAMPUNG	50	

Gambar 6. Jumlah perusahaan perkebunan tahun 2020

4) Ideologi.

Secara formal dan pada umumnya masyarakat Lampung telah menyadari bahwasannya Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara, namun belum secara total dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tampak dari masih adanya sebagian kecil masyarakat Lampung yang beraliran fundamentalis yang berlatar agama dan ajaran sempit serta radikalisme yang telah mencantumkan Islam sebagai Ideologi negara. Juga tidak kalah pentingnya adanya upaya-upaya untuk menghidupkan kembali ideologi komunisme dengan seolah-olah mengedepankan kepentingan rakyat dan kaum miskin.

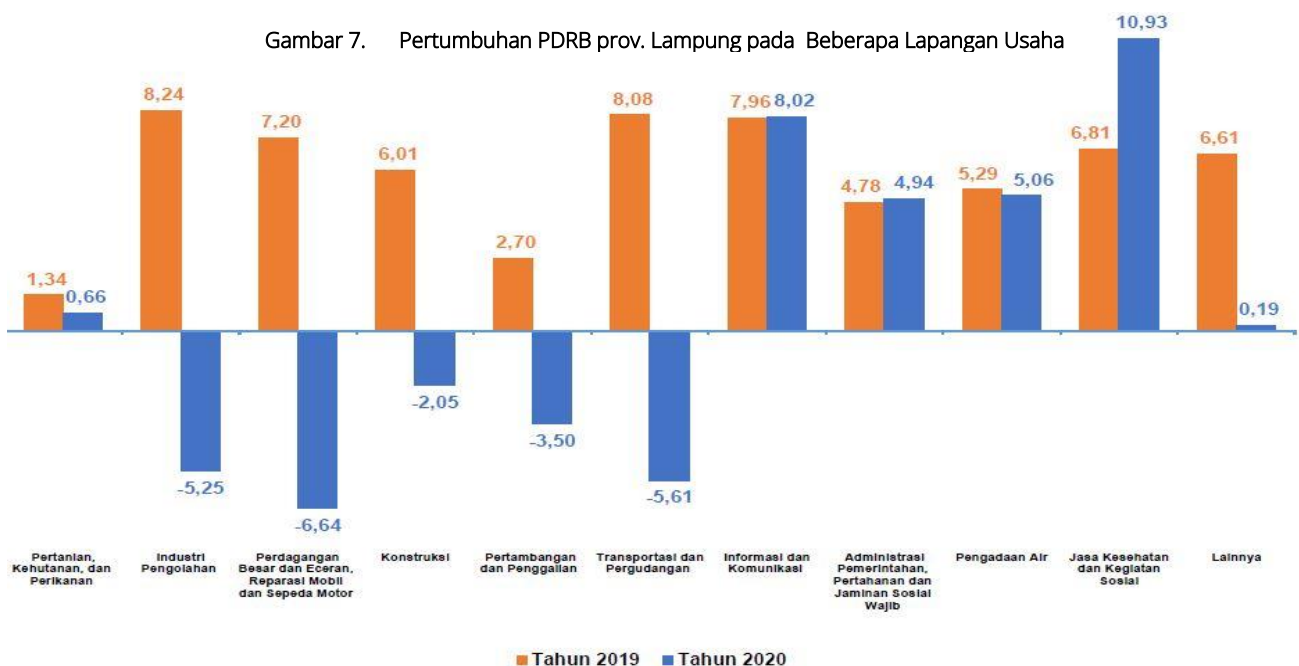
5) Politik

- a) sistem politik demokratis di wilayah Lampung yang bertumpu pada kedaulatan rakyat yang menegedepankan perdamaian, anti kekerasan dalam berbagai bentuk dan sifat sportif diharapkan melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, kuat dan efektif yang direncanakan pemilihan Pilkada pada 5 (lima) Kabupaten yaitu: Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu) yang pentahapannya sudah dimulai pertengahan tahun 2021;
- b) konflik internal penyelenggara Pemilu dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain; penyusunan DPT yang kurang akurat; kritik masyarakat terhadap netralitas KPU, Bawaslu, ASN, TNI dan Polri; dan kurangnya sosialisasi tentang penyelenggaraan Pemilu berpotensi terjadinya penundaan atau mundurnya jadwal tahapan pemilu;

- c) Beberapa partai Politik di wilayah Lampung menyelenggarakan musyawarah/konfrensi daerah, secara umum pelaksanaannya berjalan tertib dan aman, dan yang perlu dicatat wajah-wajah baru pemimpin partai yang sebelumnya tidak dinominasikan bahkan ada kecenderungan beberapa partai dalam rekrutmen pemimpin dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2022;
- d) program kebijakan Presiden RI yang dinilai inkonsisten oleh pihak oposisi akan menjadi senjata untuk menyerang wibawa pemerintahan, hal ini mudah dihembuskan karena keterbukaan saluran untuk mendapatkan informasi. Sehingga mendorong opini di masyarakat untuk mendiskreditkan kegagalan kebijakan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah;
- e) usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru terus mengemuka di Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara dan Kab. Lampung Selatan dan masih dalam pembahasan.

6) Ekonomi

- a) Kondisi perekonomian Provinsi Lampung hingga tahun 2020 - 2024 masih dipengaruhi tekanan ekonomi global dan dari epidemi *Covid-19* Struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian⁵ masih



⁵ Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Prov. Lampung edisi No. 16/02/18/Tahun XXIII, 5 Februari 2021

didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,90 persen); diikuti Industri Pengolahan (19,41 persen); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,14 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2020 yang berkontraksi pertumbuhan sebesar 1,67 persen, Lapangan Usaha Industri Pengolahan menjadi sumber kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 1,00 persen; diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82 persen; Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,30 persen; serta Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang masing-masing sekitar 0,20 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,86 persen.

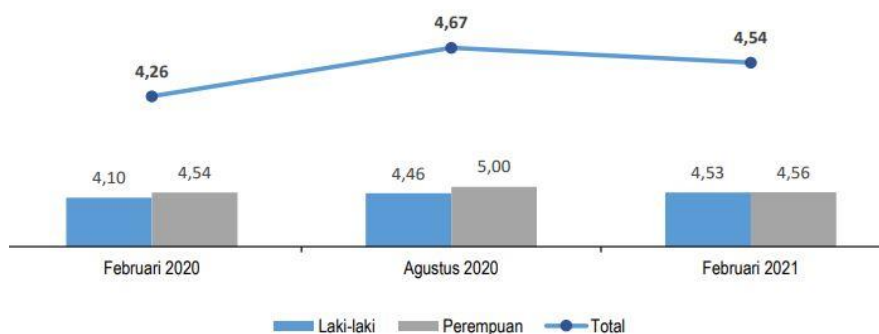
- b) Fakta tentang sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan perusahaan masih ada;
- c) salah satu yang berpengaruh juga permasalahan ekonomi akan berdampak kepada situasi Kamtibmas yaitu kebijakan Presiden Jokowi terkait dengan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia selanjutnya membias kepada terpilihnya Pelabuhan Panjang sebagai salah satu dari 20 pelabuhan yang termasuk pada Program tol laut Indonesia;
- d) dampak positif pembangunan Tol Sumatera yaitu perekonomian daerah Lampung akan berkembang antara lain pembangunan kawasan industri, pelabuhan bongkar muat, pembangunan ekonomi di sepanjang jalur tol dan perkembangan wisata baik wisata laut, alam maupun taman nasional. Seiring perkembangan ekonomi yang cukup pesat akan diikuti pula dengan meningkatnya gangguan kamtibmas baik itu kejahatan trans nasional khususnya narkoba, kejahatan berdampak kontijensi, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan konvensional.
- e) dampak Pembangunan mega proyek yang bersifat lokal yaitu Kota Baru, Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan yang saat ini ini masih mangkrak belum ada tindak lanjut dari Pemda Prov. Lampung;
- f) dampak pengembangan pembangunan Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Internasional melalui pengelolaan oleh

perum Angkasa Pura yang belum ada peningkatan dalam pembangunan;

- g) masalah rencana penghapusan/pembatasan dan pendistribusian BBM bersubsidi (Premium) dan distribusi BBM Gas LPG 3 kg, 5 kg dan 12 kg selain dapat dengan cepat memicu keresahan;
 - h) masyarakat juga membuka peluang bagi spekulasi untuk melakukan kejahatan di bidang ekonomi;
 - i) dampak kenaikan TDL;
 - j) dampak pembagian bansos;
 - k) kegiatan Lampung Expo maupun Festival Krakatau 2021;
 - l) dampak operasional jasa aplikasi *online*;
 - m) masalah konflik tanah register dan masalah tanah/pertambangan khususnya di wilayah Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Way Kanan, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan (dampak ganti rugi dari banyaknya mega proyek dilokasi Kab Lampung Selatan seperti Kota Baru/Institut Teknologi Sumatera), Kab. Pringsewu (Bendungan), Kab. Lampung Timur (ganti rugi pembangunan bendungan, dll) dan Kab. Mesuji seperti PT. Silva Inhutani, PT. BSMI, PT. PAL, PT. SGC, dll.
 - n) permasalahan pertambangan terkait baik milik perusahaan maupun perorangan/masyarakat yang terkendala dengan proses perizinan sehingga penambangan ilegal/tanpa izin masih berpotensi terjadi di wilayah Lampung.
- 7) Sosial budaya
- a) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama di provinsi Lampung sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman komponen bangsa penduduk mayoritas muslim dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa. Namun sisi lain sebagai potensi konflik pemicu desintegrasi dan terjadi intoleransi yang dapat memecah belah persatuan bangsa (Kasus Balinuraga, Bekri, Bumiratu Nuban Lampung Tengah);
 - b) peningkatan angka pengangguran dampak dari hasil pendidikan yang tidak bisa terserap oleh lapangan pekerjaan.

Menurut BPS⁶ bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan

Gambar 8. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin (persen) Provinsi Lampung, Februari 2020–Februari 2021



menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2021 sebesar 4,54 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Februari 2021, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen poin dibandingkan Februari 2020 namun mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020;

- c) masalah pemberangkatan Haji yang dikaitkan dengan kebijakan dalam penanganan *Covid-19*, masih menjadi dilema berikut pengelolaan dana haji setiap tahunnya, akan membawa dampak pada gejala di wilayah Lampung;
- d) memasuki musim kemarau bahaya kebakaran hutan, lahan dan kebun dan pada musim penghujan ancaman bahaya tanah longsor berpotensi terjadi di Kab Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus;
- e) permasalahan ekonomi yang akan berpengaruh kepada situasi Kamtibmas saat diberlakukannya program perdagangan pasar bebas *Asean Free Trade Area (AFTA)* dalam ikatan format Masyarakat Ekonomi ASEAN, ditambah lagi penyaluran bantuan sosial akibat pandemi covid-19, berikut kontroversi penolakan kebijakan terkait penanganan *Covid-19*;
- f) masalah korupsi masih mungkin terjadi dengan melibatkan pejabat daerah serta pada proses pelelangan proyek

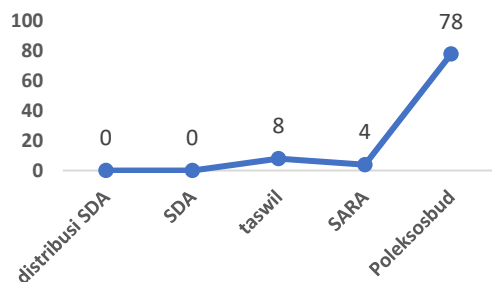
⁶ Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Prov. Lampung edisi No. 38/05/18/Th XIV, 05 Mei 2021.

pemerintah baik, Provinsi, Kabupaten dan Kota juga pada dinas dan instansi pemerintah;

- g) aksi-aksi unjuk rasa yang dipelopori LSM dan mahasiswa dengan mengedepankan kebijakan pemerintahan yang dinilainya kontroversi dan inkonsisten, permasalahan sosial budaya, sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan dan pertentangan kebijakan Pemerintah Daerah, cenderung disertai dengan aksi anarkhis;
- h) dampak dan tuntutan dari buruh untuk realisasi penghapusan sistem *outsourcing* serta kenaikan upah dan Terjadinya masalah UMR dan BPJS yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan hidup tidak diimbangi dengan peningkatan UMR dan fasilitas BPJS.

8) Keamanan

- a) rentannya terjadi konflik horizontal antar kampung dan antar etnis yang disebabkan oleh sentimen sara;



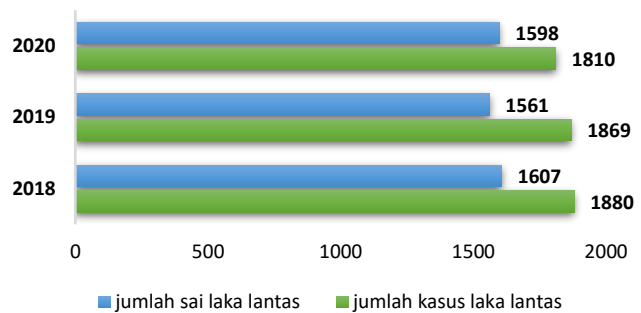
Gambar 9. Perkembangan potensi konflik tahun 2020

- b) peningkatan kejahatan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api atau senjata tajam pada daerah – daerah yang dianggap jauh dari pantauan polisi khususnya pencurian pada Minimarket dan perusahaan- perusahaan/kantor pegadaian yang ada brankas, nasabah bank, ATM termasuk juga curas dengan sasaran kendaraan R₂ dan R₄;
- c) kejahatan pencurian dengan pemberatan pada daerah pemukiman, termasuk kasus penggelapan kendaraan bermotor, pencurian dengan sasaran hewan ternak (sapi) masih kerap terjadi, terutama pada waktu menjelang dan pada saat perayaan hari – hari besar;
- d) penyalahgunaan senjata api (organik maupun rakitan) dan bahan peledak (bom ikan dan tempat penyimpanan bahan peledak) masih tetap akan mewarnai kejadian kriminalitas tahun 2021;

- e) dampak setelah program asimilasi terhadap para Napi yang dikeluarkan melakukan tindak pidana kembali sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;
- f) berkembangnya teknologi komunikasi yang tidak diimbangi dengan pengetahuan dari masyarakat sehingga menimbulkan kejahatan ITE;
- g) meningkatnya permintaan terhadap satwa dan tumbuhan yang langka menimbulkan spekulasi dimasyarakat untuk melakukan pencurian flora dan fauna yang dilindungi;
- h) terdapat 115 orang simpatisan ISIS di Provinsi Lampung, 4 Napi terorisme yang ditahan di Lapas Lampung (1 orang LP di Metro, 2 orang di LP Rajabasa, 1 orang di LP Kalianda), 9 Napi teroris asal Lampung yang ditahan di Lapas Medan, Jakarta dan Kupang serta terdapat 5 orang Eks Napi teroris di Lampung dan 23 orang Deportan Timur Tengah, patut untuk diwaspadai terhadap jaringan yang ada di wilayah Lampung;
- i) Meskipun beberapa kali Polda Lampung menggagalkan pengiriman narkoba jenis shabu, Heroin dan Ganja, namun tidak menyurutkan para pelaku untuk tetap melanjutkan peredaran dan distribusinya melalui jalur transportasi darat maupun laut;
- j) kerusuhan massa, konflik antar kampung dan gesekan massa lainnya sebagai akibat buruk dari keberagaman suku bangsa di Lampung, tidak menutup kemungkinan akan mewarnai permasalahan di tahun 2021;
- k) kejahatan yang merupakan penyakit masyarakat yaitu premanisme, perjudian dan Pornografi/aksi, termasuk modus baru Geng motor masih tetap menjadi kejahatan yang ada di masyarakat;
- l) *people smuggling dan trafficking in person*, masih sangat mungkin terjadi mengingat Lampung merupakan gerbang Sumatera yang menghubungkan dengan Jawa. Selain itu juga perairan Lampung yang luas dan jauh dari pengawasan sangat memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut;
- m) penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polda Lampung akan berdampak pada pembentukan opini negatif dan membuka peluang terhadap timbulnya sikap antipati terhadap tupoksi Kepolisian, yang berujung pada unjuk rasa anarkis pada markas/kantor kepolisian;

- n) adanya jalan tol Trans Sumatera di samping untuk mempermudah kelancaran transportasi juga membuka peluang terhadap terjadinya kejahatan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Gambar 10. Perbandingan jumlah kasus laka lintas dan penyelesaiannya tiga tahun terakhir



b. Analisis SWOT

Pelaksanaan tugas Polda Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari *internal* dan *eksternal*. Sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar ditemukan formula yang dapat menyusun kebijakan dan strategi adapun Kebijakan Pada Tahun 2022 yaitu : "Mementapkan pelayanan publik Polri yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan Sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera." Faktor internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor *eksternal* merupakan aspek peluang dan tantangan yang dihadapi antara lain; gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat. Adapun faktor eksternal tersebut saat ini antara lain; dampak dari penyebaran *Covid-19*, perkembangan teknologi informasi yang dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan siber); kecenderungan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum; *trend* perubahan modus operandi pada empat jenis kejahatan, terorisme, korupsi dan Narkoba yang menuntut Polri untuk optimal dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum; meleknya pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan menuntut Polda Lampung untuk meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan pengetahuan hukum; semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak jelasnya batas negara sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa, agar dapat ditemukan formula yang

tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas dari lingkungan *internal* maupun *eksternal* melalui analisa SWOT sebagai berikut:

- 1) Kekuatan
 - a) Saat ini postur kekuatan Polda lampung yang tergelar mulai tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kecamatan dengan struktur satu Polda dengan 25 Satker, 14 Polres/Ta, 138 Polsek dan 21 Polsubsektor merupakan sumber kekuatan kesatuan Kepolisian yang diberdayakan dalam menjaga dan memelihara kamtibmas di wilayah Provinsi Lampung;
 - b) rasio jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk adalah sebesar 1:874, dengan jumlah penduduk 9.000.878 jiwa (Sumber: sensus penduduk, BPS 2020) dan jumlah personel Polri Polda Lampung pada akhir Mei tahun 2021 adalah sebanyak 10.305 personel;
 - c) adanya dukungan sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Polda Lampung semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya peralatan operasional seperti; alat transportasi udara (helikopter), transportasi laut (kapal dengan berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil yang tergelar mulai dari Polda sampai dengan tingkat Polsek dan telah dapat mendukung kegiatan operasional Polri, guna kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat;
 - d) Dukungan anggaran Polda Lampung setiap tahun mengalami peningkatan dan dapat digunakan baik untuk kegiatan operasional maupun untuk pembinaan, sehingga menambah kepercayaan personil dalam melaksanakan tugas;
 - e) Adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan tugas Polda Lampung memungkinkan personil Polda Lampung bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang tepat dan efektif;
 - f) Implementasi kebijakan organisasi menuju Polri yang presisi dengan 4 kebijakan utama, mulai dari transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan, menjadi prioritas dalam pelaksanaan tupoksi;

- g) Adanya semangat kebersamaan dan rasa disiplin yang dimiliki oleh personil Polda Lampung menjadi potensi sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjalankan tupoksi kepolisian di wilayah Provinsi Lampung.
- 2) Kelemahan
- a) Dalam penyetaraan dengan sistem pemerintahan daerah, masih terdapat kesatuan kepolisian yang membawahi beberapa kabupaten dan kecamatan, sehingga memerlukan kekuatan *back up* yang besar dan rentang kendali yang panjang bagi pengelolaan kegiatan harkamtibmas;
 - b) pertumbuhan penduduk yang begitu cepat belum dapat diimbangi dengan penambahan personil Polri, hal ini berdampak pada aktualisasi tupoksi Kepolisian yang memerlukan bantuan besar dari peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam memelihara kamtibmas
 - c) minimnya dukungan pemeliharaan dan kemampuan dalam memperpanjang usia pakai terhadap sarana dan prasarana, menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat;
 - d) Pemanfaatan dukungan anggaran yang tidak selektif dan prioritas, menyebabkan menurunnya kinerja yang tepat sasaran sehingga berdampak pada situasi kamtibmas;
 - e) Rendahnya pemahaman personil terhadap aturan menyebabkan terjadinya maladministrasi dan pelanggaran disiplin serta kode etik, yang disebabkan kesempatan yang sangat terbatas baik pada fungsi operasional maupun pada fungsi pembinaan untuk mendapatkan pengetahuan kepolisian maupun keterampilan di lapangan terutama dalam segi penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi teknologi. sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Polda Lampung dan jajaran;
 - f) kultur budaya organisasi yang baik belum sepenuhnya dipahami dan dihayati, masih terdapat personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas, meskipun persentase pelanggaran masih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri pada Polri.

3) Peluang

- a) keberlanjutan program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), demikian juga instrumen indeks tata kelola kepolisian memberikan peluang bagi Polda Lampung untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek struktural instrumental dan khususnya aspek kultural;
- b) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan saling menunjang dengan organisasi Polri yang ada pada semua tingkatan Pemerintah;
- c) adanya kepercayaan masyarakat dan pemerintahan daerah membuka peluang bagi Polda Lampung dalam menciptakan kamtibmas melalui strategi perpolisian masyarakat dan kerjasama dengan *stakeholder* bersinergi untuk mensukseskan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung;
- d) keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang perlu dimanfaatkan oleh Polda Lampung bersama pemerintahan daerah dapat meringankan pelaksanaan teknis tupoksi Kepolisian sehingga memudahkan dalam keterpaduan mengelola dan memelihara kamtibmas.
- e) Keberadaan aparatur dekonsentrasi (kementerian dan lembaga yang berada di wilayah Provinsi Lampung) memungkinkan diselenggarakannya kerjasama guna mensukseskan pembangunan Nasional di Provinsi Lampung, terutama kerja sama dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum.

4) Ancaman

- a) rendahnya pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada institusi pemerintahan menyebabkan rendahnya kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama berakibat pada tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum menjadi rendah sehingga menimbulkan permasalahan hukum diantaranya main hakim sendiri unjuk rasa dan perilaku menyimpang;

- b) isu pembagian hasil pembangunan dalam memanfaatkan sumber daya alam antara pusat dan daerah apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan di wilayah Lampung;
- c) ketidakberhasilan dalam pembangunan di wilayah Provinsi Lampung akan berdampak terjadinya kecenderungan meningkatnya empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi Polda Lampung untuk meningkatkan kinerjanya;
- d) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi memiliki pengaruh bagaikan dua sisi mata koin yang saling berdampingan, disamping dapat berdampak positif juga dapat menimbulkan pengaruh negatif. Hal ini dapat dilihat disamping banyaknya pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi dalam mengembangkan modus kejahatan, juga mudahnya masyarakat mengakses informasi dijadikan jalan distorsi untuk mendikreditkan wibawa institusi Polri dan pemerintahan;
- e) belum optimalnya pembaharuan dalam sistem hukum, terobosan hukum dan rendahnya efek jera dari vonis hukuman serta pemberian kesempatan dalam berusaha mengakibatkan permasalahan yang kompleks dari pemanfaatan sumberdaya masyarakat di wilayah provinsi Lampung.

2. Identifikasi Masalah

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan kepolisian semakin mengharuskan Polda Lampung untuk menyusun berbagai upaya dan aksi yang konkret dan efektif guna menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis. Secara umum permasalahan yang akan dihadapi Polda Lampung pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. dampak ekonomi dari akibat adanya pandemi *Covid-19* mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa yang masih terjadi yang akan terajdai mengganggu stabilitas keamanan tahun 2022;

- c. hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat ditambah distorsi informasi menyebabkan kebutaan informasi yang sebenarnya;
- d. proses globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat;
- e. peredaran narkoba, dominasi kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung perlu pengelolaan bersama seluruh komponen *stakeholder* terkait sehingga tidak menjadi sumber keresahan bagi masyarakat disamping masih tingginya kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas ;
- f. masih tingginya konflik sosial, aksi main hakim sendiri, premanisme dan tindak kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat;
- g. perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- h. semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda, disamping masih tingginya konflik sosial, aksi sweeping, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- i. percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- j. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan; dan
- k. pulau-pulau berpenghuni perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Polri.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

a. Polri

1) Visi

“Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”

2) Misi

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

b. Polda Lampung

1) Visi

“Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib”.

2) Misi

a) **Melindungi**, yakni:

Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan segenap sumber daya provinsi Lampung yang terbebas dari gangguan kamtibmas.

b) **Mengayomi**, yakni:

Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerja sama untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas;

c) **Melayani**, yakni:

membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik yang profesional dan berkeadilan.

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Polri

Selaras dengan tujuan RPJMN 2020-2024 bidang pertahanan dan keamanan yaitu “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Adapun tema Pembangunan Polri yaitu: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

dengan fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Perlindungan Sosial dan Ketahanan Bencana dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) modernisasi pelayanan Polri;
- 4) mewujudkan Polri yang profesional;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Polda Lampung

Secara lokalitas daerah hukum Polda Lampung perlu juga sinergi dengan tujuan jangka menengah RJPMD Provinsi Lampung 2020-2024, salah satunya yaitu menegakan supermasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dilakukan melalui pemantapan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum dan memberantas KKN.

Selanjutnya dengan mempedomani tujuan jangka menengah Polri dan mendukung tujuan RJPMD Provinsi Lampung, maka tujuan jangka menengah Polda Lampung sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan tupoksi Kepolisian;
- 4) Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Polda Lampung.

3. Sasaran Prioritas

a. Polri

Mendasari Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang terdiri dari tujuh prioritas meliputi:

- 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

- 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya yang menjadi Sasaran Prioritas Polri tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam surat Edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
- 2) Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri;
- 3) Penegakkan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri”;
- 5) Pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang modern;
- 6) Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik;

b. Polda Lampung

Sebagai acuan keselarasan dalam Renja Polda Lampung T.A. 2022, adalah agenda prioritas daerah dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 selaras dengan RKP 2022 yaitu “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas.” Dari tema yang ada Provinsi Lampung memiliki 6 prioritas pembangunan di tahun 2022, yang pertama transformasi ekonomi dengan meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan. meningkatkan kualitas SDM, peningkatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, menjamin kehidupan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya, dan yang terakhir kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Berdasarkan sasaran prioritas Polri dan diselaraskan dengan agenda prioritas daerah pada RJPMD Provinsi Lampung 2020-2024, maka Sasaran Prioritas Polda Lampung tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
- 2) Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri;
- 3) Penegakkan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri”;
- 5) Pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang modern;
- 6) Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik.

III. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2022.

1. Polri

Program Prioritas nasional tahun 2022 dalam rangka Stabilitas Keamanan Nasional adalah sebagai berikut:

- a. penguatan keamanan dalam negeri;
- b. penguatan kemampuan pertahanan dibarengi CBM;
- c. penguatan keamanan laut;
- d. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. penguatan ketahanan dan keamanan siber.

Dari program prioritas nasional tersebut di atas, menjaga stabilitas keamanan nasional menjadi prioritas utama Polri, sedangkan untuk prioritas nasional lainnya, Polri merupakan pendukung atau supporting dari Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2022, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat”, yaitu:
 - 1) penguatan peran Polri dalam menjaga Keamanan Nasional melalui peningkatan deteksi aksi;
 - 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;
 - 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan “pemolisian prediktif” serta dukungan Polri dalam penanganan Covid-19”;
 - 4) penanganan konflik secara humanis;
 - 5) meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam rawan serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
 - 6) meningkatkan peran aktif Polri di wilayah rawan gempa dan bencana;
 - 7) terlaksananya pengamanan event nasional/internasional tahun 2022;
 - 8) penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional serta menanggapi gangguan kelompok kriminal bersenjata;

- 9) peningkatan kerja sama dalam/luar negeri;
 - 10) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perairan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;
 - 11) penguatan Polri di bidang keamanan di wilayah dan pulau berpenghuni.
- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri", yaitu:
- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
 - 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan meniadakan pungutan liar di pelayanan publik, serta menumbuhkan sikap petugas yang melayani;
 - 3) keterpaduan dalam pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan tatakelola RPK yang humanis serta berbasis TIK;
 - 4) mengoptimalkan quick Response kepolisian sesuai standar operasional prosedur (SOP).
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Penegakkan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik", yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi;
 - 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakkan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional.
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri", yaitu:
- 1) peningkatan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0;
 - 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kerja (ABK) , SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polri .
 - 3) melaksanakan rekrutmen, seleksi pendidikan pengembangan umum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;
 - 4) perluasan kerjasama pendidikan di dalam dan luar negeri;

- e. untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- 1) peningkatan pelaksanaan E-Government melalui E-planning, e-budgeting dan e-procurement untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri;
 - 2) pelaksanaan sistem manajemen karier berbasis kinerja serta berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah;
 - 3) peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri.
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern", yaitu;
- 1) pemenuhan sarana dan prasarana dan almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) peningkatan peran badan usaha milik negara industri strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan almatsus Polri;
 - 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan;
 - 4) melanjutkan pengembangan Labfor di kewilayahan perbatasan;
 - 5) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI;
 - 6) modernisasi sarpras Binmas;
 - 7) pembangunan dan penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.
- g. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
 - 2) penguatan Saber pungli;
 - 3) pencegahan Korupsi di internal Polri;
 - 4) meningkatkan tatakelola manajemen perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;
 - 5) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien.

- 6) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri dalam rangka good governance clean goverment.

2. Polda Lampung

Dari program prioritas nasional tahun 2022 di bidang Politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri dan Program Kapolri "Transformasi menuju Polri yang Presisi" guna mendukung mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu menjadi prioritas utama Polda Lampung, terkait dalam menjabarkan strategi sesuai dengan kondisi wilayah menetapkan sasaran prioritas sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat"**, maka arah kebijakannya sebagai berikut:
 - 1) **penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (1) menganalisa dari pemetakan potensi konflik, radikalisme dan gangguan Kamtibmas lainnya.
(giat3112/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 44, 60, 61, 62, 63,64,65,66,67);
 - (2) memetakan potensi konflik di bidang politik.
(giat3114/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 44,60,61,62, 63,64,65,66,67);
 - (3) memetakan potensi konflik di bidang ekonomi.
(giat3115/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 44,60,61,62, 63,64,65,66,67);
 - (4) memetakan potensi konflik di bidang sosial budaya.
(giat3116/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 44,60,61,62, 63,64,65,66,67);
 - (5) memetakan potensi konflik di bidang keamanan negara.
(giat3117/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 130,131,132, 133,134);
 - (6) memetakan potensi konflik di bidang keamanan khusus.
(giat3150/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 130,131,132, 133,134);

- (7) melakukan lidikpamgal terhadap potensi konflik, radikalisme dan gangguan kamtibmas lainnya.
(giat3114/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 130,131,132, 133,134);
 - (8) melakukan lidikpamgal terhadap potensi konflik, radikalisme dan gangguan kamtibmas bidang politik.
(giat3115/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 130,131,132, 133,134);
 - (9) melakukan lidikpamgal terhadap potensi konflik, radikalisme dan gangguan kamtibmas bidang sosial budaya.
(giat3116/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 130,131,132, 133,134);
 - (10) melakukan lidikpamgal terhadap potensi konflik, radikalisme dan gangguan kamtibmas bidang keamanan negara.
(giat3117/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 130,131,132, 133,134);
 - (11) melakukan lidikpamgal terhadap potensi konflik, radikalisme dan gangguan kamtibmas bidang keamanan khusus.
(giat3150/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi 130,131,132,133, 134);
 - (12) pembinaan manajerial teknis operasional fungsi intelkam.
(giat3128/prog4/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 44,60,61,62, 63,64,65,66,67);
 - (13) meningkatkan hubungan koordinasi antar satuan kerja di polda lampung melalui sarana teknologi komunikasi.
(giat3071/prog1/SP1/SS4/IKU4/renaksi PPK 33,34,35,36, 37, 38,39,40););
- 2) **meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas serta radikalisme;** untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (14) melakukan anev terhadap penggelaran satu Bhabinkamtibas satu desa/kel.
(giat5076/prog4/SP1/SS9/IKU12/renaksi PPK 51,54,55);
 - (15) penguatan pembinaan petugas polmas/ Bhabinkamtibas.

- (giat5076/prog4/SP1/SS4/IKU4/renaksi PPK 51,54,55);
- (16) meningkatkan kegiatan pembinaan, penyuluhan tentang deradikalisasi.
(giat3130/prog4/SP1/SS2/IKU4/ renaksi PPK 51,54,55);
- (17) melakukan pemetaan dinamis terhadap titik hotspot / rawan gangguan Kamtibmas; deradikalisasi.
(giat3130/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 51,54,55);
- (18) Meningkatkan kegiatan patroli pada titik hotspot/rawan gangguan kamtibmas
(giat3131/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi 50,51)
- (19) memetakan objek vital nasional dan objek vital lainnya;
(giat3131/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi 50,51);
- (20) meningkatkan kegiatan patroli pada obyek vital nasional dan obyek vital lainnya (termasuk obyek wisata)
(giat3131/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 50,51);
- (21) meningkatkan kegiatan intelijen media dalam menetralsir berita negatif.
(giat3149/prog5/SP1/SS4/IKU4/renaksi PPK 63);
- (22) membuat konten kreatif guna mencegah potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas serta radikalisme.
(giat3149/prog5/SP1/SS9/IKU13/ renaksi PPK 63);
- (23) Menyelenggarakan kegiatan penerangan masyarakat dalam pencegahan potensi gangguan kamtibmas
(giat3070/prog1/SP1/SS2/IKU2/renaksi PPK 101)
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan pemolisian prediktif serta dukungan polri dalam penanganan covid-19;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (24) memberikan pemahaman terhadap kewenangan kepolisian terbatas pada Polsus dan satpam dalam pencegahan covid-19;
(giat5076/49/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 101);
- (25) memberikan pembinaan kepada petugas linmas dan pamseakarsa dalam pencegahan Covid-19
(giat5076/49/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 78,80);

- (26) melakukan pemetaan terhadap desa/kel dalam membnetuk pemberdayaan kemitraan melalui pokdarkamtibmas.
(giat5076/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 46,47);
- (27) Melakukan pembinaan dalam penguatan pokdarkamtibmas
(giat5076/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 46,47);
- (28) meningkatkan peran aktif kegiatan patroli dalam pencegahan penyebaran Covid-19
(giat3130/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 101);
- (29) melakukan pemetaan daerah guna efektifitas kegiatan Dikmas lintas.
(giat3133/49/prog4/SP1/SS5/IKU6/ renaksi PPK 49,91);
- (30) meningkatkan kegiatan dikmas lintas guna menimbulkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
(giat5076/49/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 49,91););
- 4) penanganan konflik secara humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (31) meningkatkan sasaran agar melalui penggalangan dalam penanganan konflik di masyarakat.
(giat3116/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 60,61,62,63,64,65,66,67);
- (32) meningkatkan kegiatan kontra intelijen terhadap keamanan negara;
(giat3117/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 60,61,62,63,64,65,66,67);
- (33) meningkatkan peran bhabinkamtibmas dalam pengelolaan informasi dini dalam penanganan konflik di masyarakat;
(giat5076/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 54,55);
- 5) meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat saat jam rawan serta berperan aktif dalam mewujudkan Kamseltibcarlintas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (34) meningkatkan kegiatan turjawali samapta pada daerah rawan gangguan kamtibmas;
(giat3130/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 49);

- (35) melakukan pemetaan dinamis terhadap titik blackspot/
rawan gangguan kamtibmas.
(giat3133/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 49,107,112);
- (36) meningkatkan kegiatan patroli pada titik blackspot/rawan
gangguan kamseltibcarlantas.
(giat3133/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 49,107,112);
- 6) meningkatkan peran aktif Polri di wilayah rawan gempa dan
bencana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
 - (37) bersama dengan instansi terkait memetakan dan wilayah
rawan gempa dan bencana dalam menyusun operasi
kontijensi;
(giat328/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 74,78,129);
 - (38) mengsiagakan personel pengamanan di wilayah bencana;
(giat3130/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 74,78);
 - (39) mengsiagakan petugas bhabinkamtibmas dalam
membantu identifikasi warga desa yang terkena bencana;
(giat5076/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 123);
 - (40) mengsiagakan personel Satbrimob dalam membantu
evakuasi warga yang terkena bencana.
(giat5087/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 74,78);
 - (41) bekerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan
pelayanan kesehatan warga di wilayah bencana.
(giat3128/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 123).
- 7) terlaksananya pengamanan event nasional tahun 2022;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
 - (42) menyelenggarakan operasi kepolisian terkait
pengamanan event di daerah hukum Polda Lampung;
(giat5080/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 70,71);
 - (43) mengoptimalkan kekuatan Satbrimob yang dapat
digerakan secara cepat dalam menghadapi gangguan
keamanan saat event daerah/nasional.
(giat5087/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 70,71).
- 8) penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan
dalam rangka pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik

sosial dan menjalin sinergitas polisional serta menanggapi gangguan kelompok kriminal bersenjata; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (44) melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat.
(giat3130/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 70,71);
 - (45) menyelenggarakan *back up* Satbrimob terhadap Satwil dalam menghadapi konflik sosial.
(giat5087/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 66,67,68,69);
 - (46) menyelenggarakan operasi kepolisian pengamanan Pilkada pada lima kabupaten (Mesuji, Tulang Bawang, tulang Bawang Barat, Lampung Barat dan Pringsewu);
(giat5080/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 66,67,68,69)
 - (47) meningkatkan kegiatan Polmas dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.
(giat5076/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 44,45,46);
 - (48) pelayanan pengamanan di kawasan obvitnas dan obvit tertentu.
(giat3131/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 50,51).
- 9) peningkatan kerjasama lintas sektoral;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (49) melakukan analisa dan evaluasi terhadap MoU terkait pemeliharaan kamtibmas.
(giat3120/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 78,80);
 - (50) melakukan MoU terkait pemeliharaan Kamtibmas.
(giat3120/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 78,80).
- 10) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perairan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka **strategi** yang akan dilakukan:
- (51) penyelenggaraan kegiatan patroli perairan sepanjang garis pantai di daerah hukum Polda Lampung.
(giat3134/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 48);
- 11) penguatan Polri di bidang keamanan di wilayah dan pulau berpenghuni.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka **strategi** yang dilakukan:

- (52) Menyelenggarakan kegiatan patroli pada wilayah pulau berpenghuni;
(giat3134/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 48);
- (53) menyelenggarakan kegiatan binmas perairan pada wilayah pulau berpenghuni;
(giat3134/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 46);
- (54) menyelenggarakan kegiatan bakti sosial perairan (peduli sampah perairan);
(giat3134/prog4/SP1/SS2/IKU2/ renaksi PPK 46);
- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **" Mengoptimalkan kualitas Pelayanan publik Polri"**, yaitu:
- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (55) pemeliharaan sarana dan prasarana sentra pelayanan publik pada fungsi lintas, Samapta, pamobvit, polairud dan intelkam;
(giat5059/prog2/SP2/SS5/IKU6/ renaksi PPK 33,37,38,39,40,135,141,142,143,144);
- (56) pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik pada fungsi reskrim;
(giat3137/prog5/SP2/SS2/IKU2/ renaksi PPK 33,37,38,39,40);
- (57) pemeliharaan sarana dan prasarana bidang TIK.
(giat3071/prog1/SP2/SS2/IKU2/ renaksi PPK 37,38,40);
- (58) peningkatan pelayanan SIM *online* yang dapat menjangkau lapisan masyarakat.
(giat3133/prog4/SP2/SS5/IKU6/ renaksi PPK 141,142,143, 144);).
- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (59) peningkatan integritas peserta latihan fungsi melalui internalisasi nilai tribrata dan catur prasetya.
(giat3100/prog3/SP2/SS7/IKU10/ renaksi PPK 13,14);

- (60) menyalenggarakan kegiatan penilaian kepuasan layanan kepolisian.
(giat5054/prog1/SP2/SS5/IKU6/ renaksi PPK 140);
- (61) peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas.
(giat5076/prog4/SP2/SS5/IKU5/ renaksi PPK 16);
- (62) pembinaan manajerial teknis operasional fungsi regident lintas.
(giat3133/prog4/SP2/SS4/IKU4/ renaksi PPK 141,142,143, 144);).
- 3) keterpaduan dalam pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan tatakelola RPK yang humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (63) Pembanguanan ruang SPKT pada Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Pringsewu yang sesuai dengan direktif kapolri tentang HTCK pelayanan terpadu Polri.
(giat5062/prog2/SP2/SS8/IKU11/ renaksi PPK 37,38);
- (64) melakukan supervisi terhadap pelayanan terpadu Polri yang diselenggarakan Polres dan Polsek.
(giat5054/prog1/SP2/SS4/IKU4/ renaksi PPK 138,139,140););
- 4) mengoptimalkan *quick response* kepolisian sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (65) melakukan monev terhadap SOP pelayanan Kepolisian yang ada.
(giat3130/prog4/SP2/SS2/IKU2/ renaksi PPK 48);
- (66) meningkatkan kegiatan quick response fungsi Samapta.
(giat3130/prog4/SP2/SS2/IKU2/ renaksi PPK 37,38
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ***Penegakkan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik***, yaitu:
- 1) meningkatkan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (67) meningkatkan pengawasan langsung terhadap capaian kerja penyidik pegawai negeri sipil melalui aplikasi e-PPNS.
(giat5085/prog5/SP3/SS6/IKU9/ renaksi PPK 170,171, 172);
- (68) meningkatkan penyelesaian tindak pidana yang menonjol terutama kasus C3 (Curat, Curat dan Curanor).
(giat3142/prog5/SP3/SS3/IKU3/ renaksi PPK 80,90);
- (69) meningkatkan pemberantasan dan penanggulangan akibat tindak pidana narkoba dan sejenisnya.
(giat3144/prog5/SP3/SS3/IKU3/ renaksi PPK 884,87,89, 90);
- (70) meningkatkan pengungkapan tindak pidana ekonomi.
(giat3145/prog5/SP3/SS3/IKU3/ renaksi PPK 86,92);
- (71) meningkatkan pengungkapan tindak pidana korupsi;
(giat3146/prog5/SP3/SS3/IKU3/ renaksi PPK 84,85);
- (72) meningkatkan pengungkapan tindak pidana siber.
(giat3151/prog5/SP3/SS3/IKU3/ renaksi PPK 88,96,97);
- (73) meningkatkan pengungkapan tindak pidana pidana tertentu;
(giat5083/prog5/SP3/SS3/IKU3/ renaksi PPK 84,86,110, 111);
- (74) meningkatkan pengungkapan tindak pidana perairan.
(giat4342/prog5/SP3/SS3/IKU3/ renaksi PPK 130,131, 134);
- (75) meningkatkan pengungkapan tindak pidana perairan.
(giat4343/prog5/SP3/SS3/IKU3/renaksi PPK 130,131, 134)
- (76) memberikan bantuan pengamanan pada kegiatan TPTKP dan olah TKP;
(giat3130/prog5/SP3/SS3/IKU3/ renaksi PPK 132,133).
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (77) melakukan mapping pemutahiran data penyidik.
(giat3137/prog5/SP3/SS4/IKU4/ renaksi PPK 93,96,97);

- (78) memprioritaskan penyidik untuk diusulkan mendapat sertifikasi dari Lemdiklat Polri.
(giat3107/prog3/SP3/SS7/IKU10/ renaksi PPK 9,96).
- 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakkan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (79) meningkatkan pelayanan terhadap perkembangan hasil penyidikan melalui aplikasi SP2HP online.
(giat3137/prog5/SP3/SS5/IKU6/ renaksi PPK 34,36,174);
- (80) meningkatkan peran Wasidik dalam proses penyidikan.
(giat5086/prog5/SP3/SS3/IKU3/ renaksi PPK 166,168, 170);
- (81) mengevaluasi kinerja penyidik melalui E-MP.
(giat3137/prog5/SP3/SS6/IKU9/ renaksi PPK 7,175);
- 4) peningkatan validitas data penyelesaian tindak pidana" dengan strategi yang akan dilakukan:
- (82) melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak pidana melalau e-MP.
(giat3137/prog5/SP3/SS7/IKU10/ renaksi PPK 113,97);
- (83) meningkatkan kemampuan dalam penggunaan aplikasi e-MP.
(giat3100/prog3/SP3/SS7/IKU10/ renaksi PPK 8.9,14);
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri"**, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas dan standar pendidikan era police 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (84) melakukan pemulihan terhadap gadik/tenaga instruktur SPN Kemiling untuk mendapatkan sertifikasi.
(giat3100/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 8,9,14);
- (85) mengusulkan sertifikasi terhadap gadik/tenaga instruktur SPN Kemiling.
(giat3100/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 8,9,14);
- (86) menyelenggarakan pelatihan fungsi Binmas, Intelkam, Sabahara, reskrim, Brimob.
(giat3100/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 13,14,16);

- (87) meningkatkan kemampuan manajerial Kapolsek.
(giat3100/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 18,19);
- (88) menyusun silabus pelatihan tematis tentang penanganan konflik secara humanis.
(giat3100/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 24,25);
- (89) mengusulkan sertifikasi profesi terhadap penyidik fungsi polairud dan lantas.
(giat3107/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 18,20),
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kerja (si ABK), SIK₃ dan pengembangan struktur organisasi Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (90) melakukan monev terhadap pengisian ABK satker.
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKU5/ renaksi PPK 3,4,5);
- (91) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data SIK₃ pada satuan tingkat Polda, Polres dan Polsek serta usulan perubahan dan peningkatan satuan Kepolisian;
(giat5052/prog1/SP3/SS5/IKU5/ renaksi PPK 3,4,5);
- (92) melakukan monitoring terhadap implementasi pengembangan struktur organisasi baru, yaitu pada Polres Tulang Bawang, Polres Pringsewu dan 12 Polsek baru;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKU5/ renaksi PPK 3,4,5).
- 3) melaksanakan rekrutmen, seleksi pendidikan pengembangan umum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (93) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu melalui aplikasi Rekpro
giat3107/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 18,20,22);
- (94) menyelenggarakan kegiatan seleksi Dikbagum dengan mengoptimalkan penilaian 13 komponen secara obyektif.
(giat3107/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 18,20,22);
- (95) melakukan Monev terhadap pengisian pada aplikasi (e-rohani, e-mental, SMK online, e-yankes, e-psikologi yang mendukung dalam penilaian 13 komponen;
(giat3096/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 18,20,22).

- 4) meningkatkan kerjasama dalam rekrutmen Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (96) melakukan Monev terhadap MoU yang berhubungan dalam rekrutmen anggota Polri.
(giat3120/prog4/SP4/SS4/IKU10/ renaksi PPK 20,22,23);
- (97) melakukan pemutahiran MoU yang berhubungan dalam rekrutmen anggota Polri.
(giat3120/prog4/SP4/SS4/IKU4/ renaksi PPK 20,22,23).
- 5) peningkatan pelaksanaan E-Government melalui e-planning, e-budgeting dan e-procurement untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (98) meningkatkan kemampuan operator aplikasi Sirena pada satkar;
(giat5054/prog1/SP4/SS10/IKU4/ renaksi PPK 11,25);
- (99) menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
(giat4341/prog2/SP4/SS8/IKU11/ renaksi PPK 11,25).
- 6) pelaksanaan sistem manajemen karier berbasis kinerja serta berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (100) menyelenggarakan pemutahiran SIPP dan SMK Online.
(giat3108/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 20,22);
- (101) menyelenggarakan kegiatan Assesmen center dalam proses lelang jabatan.
(giat3108/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 20,22);
- (102) menyelenggarakan mutasi personel sesuai dengan prioritas kebutuhan organisasi.
(giat3108/prog3/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 8,9,10KU5).
- 7) peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (103) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi personel Polri dan keluarganya melalui pemutahiran keanggotaan BPJS.

(giat3072/prog1/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 160);

(104) menyelenggarakan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi personel yang melaksanakan purna tugas.

(giat3105/prog1/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 29,30,31, 32);

(105) melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan.

(giat3072/prog1/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 30,31,32);

(106) melakukan monev terhadap personel yang mengalami sakit menahun.

(giat3072/prog1/SP4/SS7/IKU10/ renaksi PPK 31,32);

(107) meningkatkan pemeliharaan sarpras alat kesehatan.

(giat5062/prog2/SP4/SS8/IKU11/ renaksi PPK 29,30).

e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ***pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern***, yaitu:

1) pemenuhan sarana dan prasarana dan almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(108) pembangunan gedung SPKT di Polres Tulang Bawang dan Polres Pringsewu;

(giat5062/prog2/SP5/SS8/IKU11/ renaksi PPK 37,38);

(109) penambahan bangunan kantor Polres Pringsewu;

(giat5062/prog2/SP5/SS8/IKU11/ renaksi PPK 37,38);

(110) meningkatkan perawatan dan pemeliharaan gedung perkantoran.

(giat5062/prog2/SP5/SS8/IKU11/ renaksi PPK 37,38);

2) peningkatan peran pemerintah dalam mendukung pemenuhan sarpras;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(111) memberikan bantuan teknis dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor di Polda Lampung.

(giat5062/prog2/SP5/SS8/IKU11/ renaksi PPK 37,38,39, 40);

- (112) melanjutkan pembangunan gedung rawat inap rumkit Bayangkara;
(giat5062/prog2/SP5/SS8/IKU11/ renaksi PPK 37,38,39, 40);
- (113) pengadaan kendaraan R4 untuk sektor Bidkum, Bidkeu dan Bidhumas;
(giat5062/prog2/SP5/SS8/IKU11/ renaksi PPK 37,38,39, 40);
- 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (114) menyelenggarakan pengadaan rumah dinas Polres Tulang Bawang.
(giat5062/prog2/SP5/SS8/IKU11/ renaksi PPK 37,38,39);
- 4) melanjutkan pemanfaatan *Command Center*.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (115) melakukan pemeliharaan gedung dan peralatan pada lima titik command center.
(giat5062/prog2/SP5/SS8/IKU11/ renaksi PPK 37,38,39);
- 5) pengembangan jaringan internet;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (116) melanjutkan pengadaan instalasi jaringan internet di Gedung Polda baru;
(giat3084/prog2/SP5/SS9/IKU12/ renaksi PPK 48,51,55);
- 6) modernisasi sarpras Binmas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (117) menyiapkan personel Bhabinkamtibmas dalam memanfaatkan aplikasi *Binmas online System*.
(giat5076/prog4/SP5/SS98/IKU12/ renaksi PPK 48,51,55);
- 7) pembangunan dan penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(118)pembinaan SPBE.

(giat5052/prog1/SP5/SS9/IKU12/ renaksi PPK 33,34,35);

(119)mengoptimalkan penggunaan call center 110

(giat5080/prog4/SP5/SS9/IKU12/ renaksi PPK 33,34,35).

f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik**”, yaitu:

1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online lain;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(120)melayani pengaduan masyarakat terkait kinerja anggota Polisi melalui aplikasi propam presisi.

(giat3089/prog1/SP6/SS6/IKU8/ renaksi PPK 176,177);

(121)meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat melalui kesiapan penggunaan aplikasi dumas presisi.

(giat3091/prog1/SP6/SS6/IKU7/ renaksi PPK 174,175);

(122)meningkatkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu.

(giat3089/prog1/SP6/SS6/IKU8/ renaksi PPK 168,169);

(123)mengakselerasi pengaduan masyarakat yang bersumber dari pengawas eksternal;

(giat3089/prog1/SP6/SS6/IKU7/ renaksi PPK 163,164,165).

2) penguatan Saber pungli;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(124)meningkatkan sinergi kerjasama antar Pokja satgas Saber pungli dalam pengungkapan kasus pungli;

(giat3089/prog1/SP6/SS6/IKU7/ renaksi 168,169);

(125)meningkatkan kegiatan pengamanan personel dan bahan keterangan dan kegiatan internal kepolisian;

(giat3089/prog1/SP6/SS6/IKU8/ renaksi 168,173);

(126)meningkatkan kegiatan saber pungli yang terjadi di lingkungan Polda Lampung dan jajaran.

(giat3089/prog1/SP6/SS6/IKU7/ renaksi 167,168,169).

- 3) pencegahan Korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (127)mengaktifkan evaluasi terhadap LHKPN.
(giat3091/prog1/SP6/SS6/IKU7/ renaksi PPK 163,164,165);
- (128)pembinaan pembangunan Zona Integritas.
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU5/ renaksi PPK 6,7);
- (129)mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penganggaran keuangan, operasional, pembinaan dan penyelenggaraan dan pemeliharaan sarpras;
(giat3089/prog1/SP6/SS6/IKU7/ renaksi PPK 163,165)
- 4) meningkatkan tatakelola manajemen perencana dan penganggaran Polri yang akuntabel;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (130)pembinaan perencanaan kinerja dan anggaran.
(giat5054/prog1/SP6/SS10/IKU14/ renaksi PPK 6,7,11);
- (131)pembinaan pengendalian kinerja anggaran.
(giat5054/prog1/SP6/SS10/IKU14/ renaksi PPK 6,7,11);
- (132)pembinaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
(giat3068/prog1/SP6/SS10/IKU14/ renaksi PPK 6,7,11);
- (133)pembinaan dalam penata kelolaan SIMAK-BMN.
(giat5054/prog1/SP6/SS4/IKU4/ renaksi PPK 4,5,6);
- (134)pembinaan HTCK pada SOTK Polres dan Polsek sesuai dengan Perpol Noimor 2 tahun 2021;
(giat5054/prog1/SP6/SS4/IKU4/ renaksi PPK 4,5,6);
- 5) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (135)menyiapkan pengusulan pembentukan Polsubsektor dan Polsek.
(giat5054/prog1/SP6/SS10/IKU14/ renaksi PPK 1);
- (136)menyiapkan pengusulan perubahan tipologi kesatuan Polsek dan Polres.
(giat5054/prog1/SP6/SS10/IKU14/ renaksi PPK 1);

(137) penataan daerah hukum Polres dan Polsek.
(giat5054/prog1/SP6/SS10/IKU14/ renaksi PPK 3);

(138) melakukan analisa dan evaluasi organisasi Polres
(giat5054/prog1/SP6/SS10/IKU14/ renaksi PPK 1);

- 6) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri dalam rangka *good govermance* dan *clean goverment*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(139) melaksanakan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi polri.
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU5/ renaksi PPK 139,140);

(140) Memberikan petunjuk dan arahan terkait kegiatan reformasi birokrasi Polri
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU5/ renaksi PPK 139,140);

(141) pembangunan zone integritas pada satuan kerja di lingkungan Polda Lampung dan jajaran menuji WBK dan WBBM;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU5/ renaksi PPK 139,140);

(142) melakukan asistensi dan evaluasi terhadap pelayanan publik.
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU5/ renaksi PPK 139,140);

(143) Pembinaan ITK-O;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU5/ renaksi PPK 139,140);

(144) pembinaan Sinovik;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU5/ renaksi PPK 139,140);

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2022

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen.

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) pelayanan administrasi keuangan Polri; (3068);
- b) penerangan masyarakat; (3070);
- c) penyelenggarakan Teknologi Informasi; (4071);
- d) pelayanan kesehatan Polri; (3072);
- e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri; (3073);
- f) pertanggungjawaban profesi; (3088);
- g) penyelenggarakan pengamanan internal Polri; (3089);
- h) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri; (3090);
- i) penyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan; (3091);
- j) pengelolaan multimedia; (3149);
- k) pemberian bantuan dan nasehat hukum; (3154);
- l) penyusunan dan penyuluhan hukum; (3155);
- m) penyusunan kebijakan Polri; (5051);
- n) penata kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri; (5052);
- o) Reformasi Birokrasi Polri; (5053);
- p) Manajemen Anggaran; (5054);
- q) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (5056).

b. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional;

2) Kegiatan:

- a) pengembangan peralatan Polri; (3084)
- b) dukungan manajemen dan teknik Sarpras; (5059)
- c) pengembangan fasilitas dan kontruksi Polri. (5062).

c. Program Profesionalisme SDM Polri.

1) Tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) Kegiatan

- a) dukungan Manajemen profesionalisme SDM Polri; (3096)
- b) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri; (3100)
- c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri; (3105)
- d) pembinaan karier personel Polri; (3108)
- e) pelayanan psikologi anggota Polri.(3110)

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan:

Terpelihara Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif;

2) Kegiatan:

- a) analisis keamanan; (3112)
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik; (3114)
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi; (3155)
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya; (3116)
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara; (3117)
- f) Kerjasama keamanan dan ketertiban K/L; (3120)
- g) Dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (3128)
- h) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara; (3130)
- i) Penyelenggaraan pengamanan obyek vital; (3131)
- j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalulintas; (3133)
- k) penyelenggaraan kepolisian perairan; (3134)

- l) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus; (3150)
 - m) pembinaan potensi keamanan; (5076)
 - n) pengendalian operasi kepolisian; (5080)
 - o) pelacakan dan penangkapan keamanan dan ketertiban; (5081) dan
 - p) penanggulangan keamanan dalam negeri. (5087)
- e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- 1) Tujuan: `

Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi Hak asasi manusia;
 - 2) Kegiatan:
 - a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (3137)
 - b) penindakan tindak pidana umum; (3142)
 - c) penindakan tindak pidana narkoba; (3144)
 - d) penindakan tindak pidana ekonomi khusus; (3145)
 - e) penindakan tindak pidana korupsi; (3146)
 - f) penindakan tindak pidana siber; (3151)
 - g) penindakan tindak pidana perairan; (4342)
 - h) penindakan tindak pidana laka lantas; (4343)
 - i) penindakan tindak pidana tertentu; (5083)
 - j) koordinasi dan pengawasan PPNS; (5085) dan
 - k) pengawasan penyidikan. (5086).

2. Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2022.

Alokasi Pagu indikatif Polda Lampung T.A. 2022 sebesar **Rp.1.215.224.131.000,-** (*satu triliun dua ratus lima belas miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dengan perincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

- a. Rincian Alokasi Pagu Indikatif T.A. 2022 per Jenis Belanja sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 791.496.236.000,-
 - 2) Belanja Barang Rp. 421.877.895.000,-
 - 3) Belanja Modal Rp. 1.850.000.000,-

- b. Rincian Pagu Indikatif T.A. 2022 per sumber anggaran sebagai berikut:
- 1) Rupiah Murni Rp. 1.132.936.504.000,-
 - 2) PNBP Rp. 61.177.394.000,-
 - 3) BLU Rp. 21.110.233.000,-
- c. Rincian alokasi Pagu indikatif T.A. 2022 per Program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Dukungan manajemen Rp. 662.802.506.000,- (*enam ratus enam puluh dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus enam ribu rupiah*) meliputi :
 - a) pelayanan administrasi keuangan Polri Rp.565.000.000,- (*lima ratus enam puluh lima juta rupiah*).
 - b) penerangan masyarakat Rp.1.299.120.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
 - c) penyelenggaraan Teknologi informasi Rp.1.102.366.000,- (*satu milyar seratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
 - d) pelayanan kesehatan Polri Rp.27.644.650.000,- (*dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp.624.476.945.000,- (*enam ratus dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
 - f) pertanggungjawaban profesi Rp.425.183.000,- (*empat ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*)
 - g) penyelenggaraan pengamanan internal perkantoran Rp.810.128.000,- (*delapan ratus sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*)
 - h) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri Rp.314.284.000,- (*tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*)
 - i) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp.1.165.965.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

- j) pengelolaan multimedia Rp.25.489.000,- (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - k) pemberian bantuan dan nasehat hukum Rp.1.363.914.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
 - l) penyusunan dan penyuluhan hukum Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
 - m) penyusunan kebijakan Polri Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - n) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri Rp.131.350.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - o) Reformasi Birokrasi Polri Rp. 705.057.000,- (tujuh ratus lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - p) manajemen anggaran Rp. 2.333.055.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah).
 - q) Pengelolaan informasi dan dokumentasi Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Program Modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp. 143.485.675.000,- (seratus empat puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) meliputi :
- a) pengembangan peralatan Polri Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b) (dukungan manajemen dan Teknik Sarpras Rp.141.635.675.000,- (seratus empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratustujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) pengembangan fasilitas dan kontruksi Polri Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Program Profesionalisme SDM Polri Rp.18.520.823.000,- (delapan belas milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) meliputi :
- a) dukungan manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri Rp.17.791.398.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh

delapan ribu rupiah);

- b) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri Rp.92.775.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri Rp.283.650.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Pembinaan karier personel Polri Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - e) pelayanan psikologi anggota Polri Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
- 4) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp.289.685.836.000,- (*dua ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah*) meliputi :
- a) analisis keamanan Rp.2.820.322.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Rp.4.798.240.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Rp.4.609.516.000,- (empat milyar enam ratus sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
 - d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya Rp.4.586.929.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Rp.6.737.512.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
 - f) kerjasama keamanan dan ketertiban K/L Rp.49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - g) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan

- keamanan dan ketertiban masyarakat Rp.186.961.720.000,- (seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- h) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara Rp.10.369.878.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- i) penyelenggaraan pengamanan objek vital Rp.8.152.731.000,- (delapan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribuenam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lintas Rp. 14.822.095.000,- (empat belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- k) penyelenggaraan Kepolisian Perairan Rp.474.843.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- l) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus Rp.2.595.697.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- m) pengendalian operasi kepolisian Rp.6.861.239.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- n) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban Rp.550.494.000,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- o) penanggulangan keamanan dalam negeri Rp.64.921.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- 5) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp.100.729.291.000,- (seratus milyar tujuh ratus dua puluh sembilan satu juta ribu rupiah) meliputi :
- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp.33.182.790.000,- (tiga puluh

tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- b) penindakan Tindak Pidana Umum Rp.38.369.911.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
- c) penindakan tindak pidana narkoba Rp.19.883.321.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- d) penindakan tindak pidana ekonomi khusus Rp.667.864.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- e) penindakan tindak pidana korupsi Rp.4.439.569.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- f) (penindakan tindak pidana siber Rp.1.270.170.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- g) penindakan tindak pidana perairan Rp.756.294.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- h) penindakan tindak pidana laka lantas Rp.1.119.693.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- i) penindakan tindak pidana tertentu Rp.863.224.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- j) Koordinasi dan pengawasan PPNS Rp.66.855.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- k) pengawasan penyidikan Rp.109.600.000,- (*seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).

3. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2022.

- a. memperbaiki proses penyusunan perencanaan anggaran dengan mengalokasikan anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada program-program prioritas pemerintah yang telah dibuat (*money follow program*) sehingga bisa lebih terlihat kemanfaatannya, tidak lagi mendasari pada fungsi (*money follow*

function);

- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan;
- c. mengalokasikan anggaran disusun sampai dengan unit kerja pelaksana berdasarkan berdasarkan analisis beban kerja secara proporsional dan profesional dengan memperhatikan sumber daya *input* (SDM, Sarpras dan anggaran (sesuai program prioritas dan target kinerja bidang keamanan yang telah ditetapkan serta terintegrasi dan berkelanjutan sesuai prinsip pendekatan penganggaran;
- d. pengalokasian anggaran lebih difokuskan pada sasaran prioritas dan berkualitas serta meningkatkan operasional kepolisian pada unit-unit opsional kepolisian terdepan (Polres dan Polsek) dalam rangka meningkatkan kehadiran anggota Polri;
- e. penyusunan anggaran Satker harus melalui proses pengkajian atau monitoring dan evaluasi dengan skala prioritas, memperhatikan spesifikasi teknik, harga ekonomi dan rasional berdasarkan asas manfaat serta telah mempredisikan kalender Kamtibmas yang diperkirakan terjadi Tahun 2022;

IV. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung T.A. 2022 disusun sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan Polda Lampung dan jajaran pada T.A. 2022.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 28 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



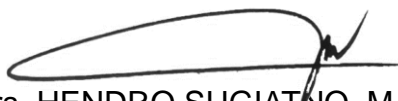
**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLDA LAMPUNG TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	Indeks keamanan dan ketertiban	3,3	
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif	Indeks pemeliharaan kamtibmas	73	
2.	Penegakkan hukum yang berkeadilan	Indeks penegakkan hukum	68	
3.	Sumber daya manusia yang profesional	Indeks profesionalitas SDM	75	
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan	a. Indeks dukungan sarana prasarana dan peralatan	70,5	
		b. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,3	
		c. Nilai pengelolaan informasi pemberitaan	52	
5.	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel.	a. Indeks penguatan implementasi kebijakan	73	
		b. Indeks tata kelola kepolisian	5,3	
		c. Indeks kepuasan kepolisian	81	
		d. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	67	
		e. Persentase penyelesaian pelanggaran personel	83	
		f. Persentase penyelesaian masalah hukum	91,6	
		g. Nilai kinerja anggaran.	76	

Ditetapkan di: Bandar Lampung
pada tanggal: 28 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2022

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. VISI : Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib
3. MISI : Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat
4. UNIT ORGANISASI : KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2022 (RIBU)
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
Total		0,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Keamanan dan ketertiban yang kondusif		16.541.449.028,0
01.01	Indeks Keamanan dan ketertiban	3,3	
02	Pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif		5.260.415.274,0
02.01	Indeks Pemeliharaan Kamtibmas	73	
03	Meningkatnya penegakkan hukum yang berkeadilan		2.969.819.127,0
03.01	Indeks Penegakkan hukum	68	
04	Kebijakan fungsional kepolisian yang integratif		22.713.821.717,0
04.01	Nilai Penguatan Implementasi Kebijakan	73	
05	Pengelolaan Tupoksi organisasi yang efektif		50.038.519.248,0
05.01	Indeks tata kelola Kepolisian	5,3	
05.02	Indeks kepuasan Kepolisian	81	

060.WA	Program Dukungan Manajemen	651.960.339,0	2.732.116,0	18.061.155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672.753.610,0
Total		1.146.764.097,0	64.747.030,0	20.381.155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.231.892.282,0

Bandar Lampung, 28 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	92.775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.775,0
3105	Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	283.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283.650,0
3108	Pembinaan Karier Personel Polri	130.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri	223.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223.000,0
Total		18.520.823,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.520.823,0

Bandar Lampung, 28 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Penegakkan hukum secara berkeadilan
 3. PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
 4. UNIT ORGANISASI : KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2022 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi		100.729.291,0
01.01	Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.	2013	
01.02	Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.	428	
01.03	Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara,	84	
01.04	Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.	59	
Total			100.729.291,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	layanan penegakkan hukum oleh Polri	100.729.291,0
01.01	Indeks Penegakkan hukum Polri	
Total		100.729.291,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	33.182.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.182.790,0
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	38.369.911,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.369.911,0
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	19.883.321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.883.321,0
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	667.864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	667.864,0
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	4.439.569,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.439.569,0
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	1.270.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.170,0
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan	756.294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756.294,0
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	0,0	1.119.693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.119.693,0
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	863.224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863.224,0
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	66.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.855,0
5086	Pengawasan Penyidikan	109.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.600,0
Total		99.609.598,0	1.119.693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.729.291,0

Bandar Lampung, 28 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG




Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	119.043.377,0	22.362.298,0	230.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141.635.675,0
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	0,0	0,0	1.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350.000,0
Total		119.043.377,0	22.362.298,0	2.580.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143.485.675,00

Bandar Lampung, 28 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	550.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550.494,0
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	64.921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.921,0
Total		237.237.507,0	32.940.204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289.685.836,0

Bandar Lampung, 28 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	48.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.500,0
Total		640.915.151,0	2.857.122,0	19.030.233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	662.802,506,0

Bandar Lampung, 28 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLI



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

Jl. WR. Supratman No. 1 Bandar Lampung 35212 Telp. (0721) 486841, Faks (0721) 482803
email : biorenalampung@gmail.com